

Selasa, 26 Juli 2011

Pemprov Minta BPK Audit Aset Terdahulu



CORNELIS.

FOTO: DOK

Pontianak, BERKAT.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit aset-aset terdahulu, termasuk dari kepemimpinan sebelumnya.

"Aset yang lama-lama ini jadi persoalan. Bukan hanya aset KONI saja yang diaudit," tegas Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH di Gedung DPRD Kalbar, Senin (25/7).

Menurutnya, audit yang dilakukan oleh BPK dimulai dari aset yang dulu, seperti rumah, tanah, mobil dinas, dan lain sebagainya. Audit ini untuk melihat mana aset yang masih ada surat, mana yang belum, mana yang sudah di doom, mana yang belum dan nanti akan ketahuan setelah ada audit dari BPK.

"Hasil dari audit BPK itu lah yang nanti kita serahkan ke DPRD untuk dipansuskan," kata Cornelis.

Ia mengatakan, semua aset sudah tercatat ketika ia mulai memerintah, yaitu tahun 2009. Aset yang tercatat di pengelola aset ini tidak hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tapi juga proyek-proyek pembangunan dan milik Pemprov Kalbar.

"Ketika jaman saya, itu sudah tercatat dan sudah diserahkan kepada pengelola aset. Sejak tahun 2009," ungkap Gubernur Cornelis.

Ia mengatakan dengan diaudit oleh BPK, maka Pemprov Kalbar pun bisa mendata, karena ada kemungkinan dari aset tersebut yang berubah, atau ada aset yang layak dihapus karena tidak layak digunakan tadi.

"Target kita selesai tahun ini. Makanya kita minta BPK untuk mengaudit," kata Gubernur Cornelis.

Menurutnya, jika memang BPK tidak mampu karena banyaknya aset yang harus diaudit, bisa saja menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan untuk membantu mengaudit aset yang dimiliki oleh Pemprov Kalbar. "Tinggal kesungguhan pejabatnya saja," tegas Cornelis. (nia)